

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan berkesinambungan.

Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan agar terarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dijelaskan antara lain bahwa setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan II Tahun 2014 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas selama 6 (enam) bulan tahun 2014, dan laporan ini merupakan hasil akumulasi realisasi Bulan Januari sampai dengan Juni 2014.

B. TUJUAN

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

C. DASAR DAN METODOLOGI PEMANTAUAN

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas
5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.36/M.PPN/HK/04/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 103/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, PPK, dan BPA SATKER .
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-055.01.1.017312/2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2014 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

Laporan hasil pemantauan ini disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya dijelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

BAB II

GAMBARAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBN)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2010-2014. Visi tersebut adalah untuk *“mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

TABEL 1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar-waktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2014 dengan RPJMN 2010-2014
			2. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan rancangan RKP 2015
			3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2015
			4. % Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana
			5. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2015
2.	Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya.	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas.
3.	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
			2. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas
			3. Fasilitasi dan pembinaan SDM Aparatur perencana pusat dan daerah
			4. Akuntabilitas Laporan Keuangan
			5. Standar Penilaian <i>good governance</i>

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
PENETAPAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Kesesuaian RPJMN dan RKP 2014 dengan Renja dan RKA K/L 2014)	1. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Unit Kerja Eselon I dan II di Kedeputian
	2. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2015 dengan RPJMN 2015-2019	100%		
	3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2015 dengan rancangan RKP 2015	100%		
	4. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2015 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2015	100%		
	5. % sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	100%		
	6. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	90%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	% pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	Unit Kerja Eselon I dan II di Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri
	% fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah	100%		
	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	80%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Setmen PPN/Bappenas (Biro Umum)
	1. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Unit Kerja Eselon I dan II di Inspektorat Utama Bappenas
	2. Standar penilaian <i>good governance</i>	Baik		

C. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program Generik

- 1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Generik3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satuan Kerja utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan

pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputian. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014.

Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

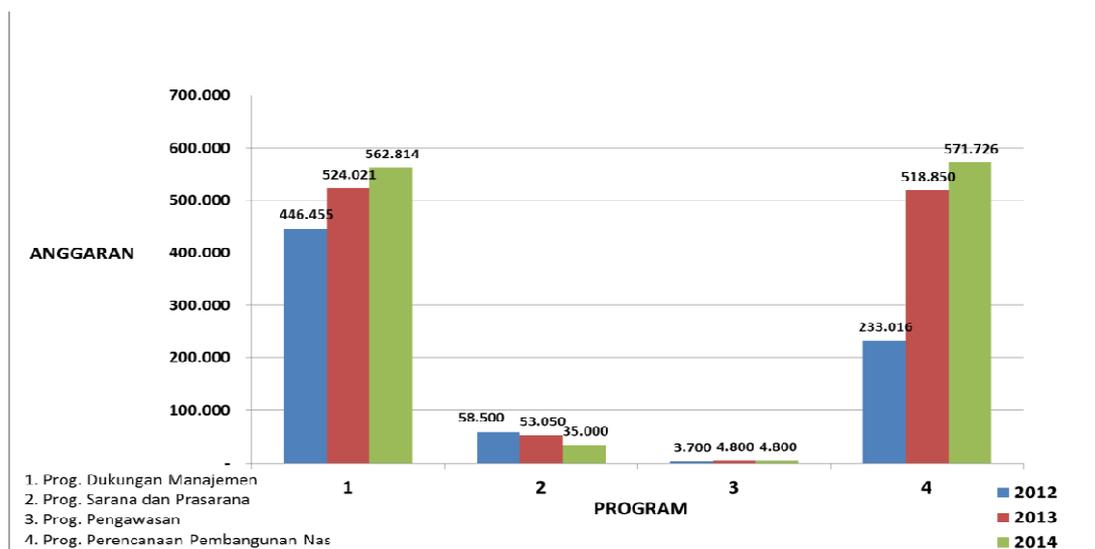
Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputian di lingkungan UKE I (Kedeputian), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

D. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2014 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.189.975.111.000,- yang terdiri dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 612.708.469.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 290.682.900.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 286.583.742.000,-. Alokasi anggaran tersebut naik 3,45% dari alokasi dana pada tahun 2013. Alokasi dana RM meningkat sebesar 7,36%, sedangkan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) mengalami penurunan sebesar 0,81% dari alokasi tahun sebelumnya. Sementara itu alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2012-2014.

GAMBAR 1
ALOKASI DANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2012-2014

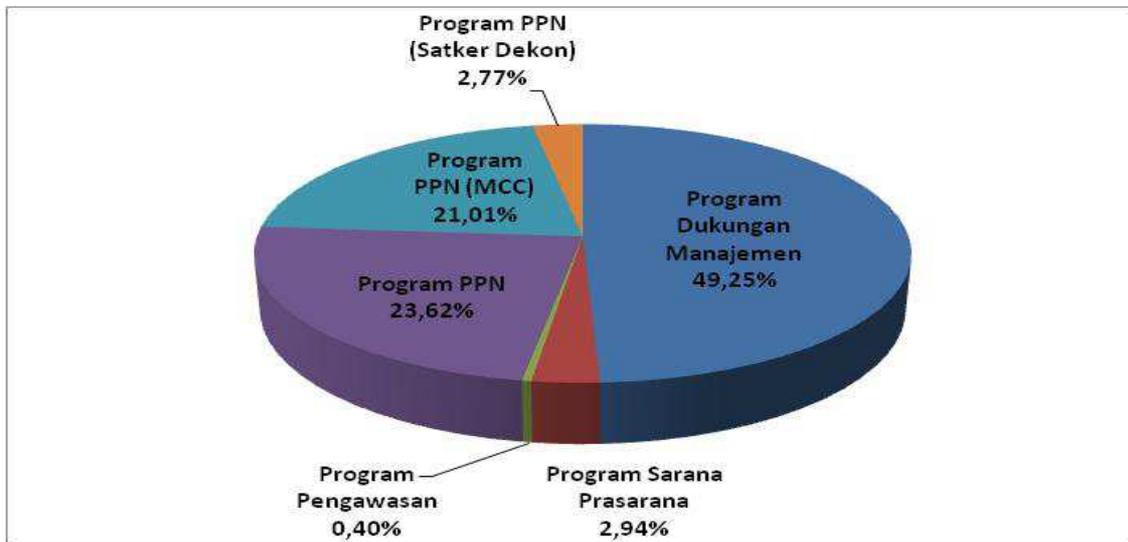


Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan penetapan kinerja tahun 2014, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2014 menurut program terdapat pada Tabel 3 dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	ALOKASI DANA (dalam ribu)			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH
SATKER 017312					
I	Perencanaan Pembangunan Nasional	184.490.030	74.287.000	32.853.972	291.631.002
II	Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya	345.418.469	216.395.900	3.729.770	565.544.139
III	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	35.000.000	-	-	35.000.000
IV	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4.800.000	-	-	4.800.000
JUMLAH		569.708.499	569.708.499	290.682.900	860.391.399
SATKER 966009					
V	Perencanaan Pembangunan Nasional	10.000.000		250.000.000	260.000.000
SATKER DANA DEKONSENTRASI (33 PROVINSI)					
VI	Perencanaan Pembangunan Nasional	32.999.970	-	-	32.999.970
TOTAL		612.708.469	290.682.900	286.583.742	1.189.975.111

GAMBAR 2
PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014



Dari Tabel 3 dan Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua unit kerja eselon I dan II.

Pada tahun 2014, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 11 (sebelas) PLN dan 8 (delapan) HLN, dengan nilai total sebesar Rp. 577.266.642.000,-(termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDP III dan PHRDP IV), sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut:

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PLN	HLN	JUMLAH
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA		216.395.900.000	3.729.770.000	220.125.670.000
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II	-	3.729.770.000	3.729.770.000
1	1 Biro SDM	-	3.729.770.000	3.729.770.000
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV	216.395.900.000	-	216.395.900.000
1	1 Pusbindiklatren	216.395.900.000	-	216.395.900.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		74.287.000.000	282.853.972.000	357.140.972.000
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	7.843.417.000	7.843.417.000
1	1 Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	4.843.417.000	4.843.417.000
2	2 Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.500.000.000	1.500.000.000
3	3 Direktorat Agama Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	1.500.000.000	1.500.000.000
2	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	-	3.350.000.000	3.350.000.000
1	1 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	-	3.350.000.000	3.350.000.000
3	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	7.884.965.000	7.884.965.000
1	1 Direktorat Lingkungan Hidup	-	7.884.965.000	7.884.965.000
4	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	-	12.560.990.000	12.560.990.000
1	1 Direktorat Permukiman dan Perumahan	-	12.560.990.000	12.560.990.000
5	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	10.244.900.000	-	10.244.900.000
1	1 Direktorat Pengembangan Wilayah	10.244.900.000	-	10.244.900.000
6	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	-	1.214.600.000	1.214.600.000
1	1 Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	-	1.214.600.000	1.214.600.000
7	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	17.488.100.000	-	17.488.100.000
9	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	46.554.000.000	-	46.554.000.000
9	PPK PENGELOLAAN HIBAH MCC SATKER 966009)	-	250.000.000.000	250.000.000.000
JUMLAH		290.682.900.000	286.583.742.000	577.266.642.000

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 564.054.513.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 206.913.541.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 357.140.972.000,-. Anggaran pada program ini meningkat sebesar 5,95% dari anggaran tahun 2013,-. Hal ini disebabkan adanya perpindahan dana dekonsentrasi dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Khusus untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 3 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepatian (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 2) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 3) Satker Dana Dekonsentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 6).

TABEL 5
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PAGU (dalam ribu)			JUMLAH
		RM/RMP	PLN	HLN	
1	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	17.270.000	-	7.843.417	25.113.417
2	PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	13.693.342	-	-	13.693.342
3	PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM	19.200.950	-	3.350.000	22.550.950
4	PPK Deputy Bidang Ekonomi	13.490.000	-	-	13.490.000
5	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.730.000	-	7.884.965	25.614.965
6	PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	14.932.440	-	12.560.990	27.493.430
7	PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	24.529.279	10.244.900	-	34.774.179
8	PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	15.060.000	-	1.214.600	16.274.600
9	PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	14.340.000	-	-	14.340.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	5.326.990	17.488.100	-	22.815.090
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development</i> Program	8.340.570	46.554.000	-	54.894.570
12	PPK Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	10.000.000	-	250.000.000	260.000.000
13	Satker Dekon (33 Provinsi)	32.999.970	-	-	32.999.970
	TOTAL	206.913.541	74.287.000	282.853.972	564.054.513

TABEL 6
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2014

NO	BAPPEDA	ALOKASI
1	010025 -Bappeda Provinsi DKI Jakarta	799.290.000
2	020060 - Bappeda Provinsi Jawa Barat	838.290.000
3	030060 - Bappeda Provinsi Jawa Tengah	915.690.000
4	040069 - Bappeda Provinsi DIY	920.490.000
5	050060 - Bappeda Provinsi Jawa Timur	943.290.000
6	060004 - Bappeda Provinsi Aceh	1.045.290.000
7	070060 - Bappeda Provinsi Sumatera Utara	1.006.890.000
8	080019 - Bappeda Provinsi Sumatera Barat	958.890.000
9	090020 - Bappeda Provinsi Riau	962.490.000
10	100086 - Bappeda Provinsi Jambi	931.290.000
11	110060 - Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	920.490.000
12	120022 - Bappeda Provinsi Lampung	882.090.000
13	130019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	949.290.000
14	140018 - Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	960.690.000
15	150060 - Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	961.290.000
16	160019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1.006.290.000
17	170021 - Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1.079.490.000
18	180060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.080.090.000
19	190060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	1.008.090.000
20	200019 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	1.027.890.000
21	210019 - Bappeda Provinsi Maluku	1.190.490.000
22	220060 - Bappeda Provinsi Bali	976.290.000
23	230020 - Bappeda Provinsi NTB	974.490.000
24	240026 - Bappeda Provinsi NTT	1.078.290.000
25	250060 - Bappeda Provinsi Papua	1.252.890.000
26	260070 - Bappeda Provinsi Bengkulu	940.290.000
27	280016 - Bappeda Provinsi Maluku Utara	1.167.090.000
28	290009 - Bappeda Provinsi Banten	823.290.000
29	300092 - Bappeda Provinsi Bangka Belitung	913.290.000
30	310060 - Bappeda Provinsi Gorontalo	1.063.890.000
31	320099 - Bappeda Provinsi Kepulauan Riau	955.290.000
32	330096 - Bappeda Provinsi Papua Barat	1.400.490.000
33	340030 - Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1.066.290.000
TOTAL		32.999.970.000

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.999.970.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi

Melaksanakan peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yaitu:

- a) Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
- b) Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium di Indonesia.
- c) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- d) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.
- e) Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan *Pro Poor Planning And Budgeting Monitoring* (P3BM).
- f) Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) Dan Urusan Bersama.

2. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Musrenbangnas

Fasilitasi perkuatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas muasyawah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) dan dokumen perencanaan dengan fokus pada:

- a) Koordinasi isu, program, dan kegiatan strategis masing-masing provinsi yang akan dibahas pada forum Musyawarah Pembangunan Nasional untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dapat mencerminkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b) Koordinasi penilaian dan penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp.565.544.139.000,-. Alokasi ini terdiri dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 345.418.469.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 220.125.670.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2014 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PPK DM) dapat dilihat pada Tabel 7.

TABEL 7
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PPK	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)			
		RM	PHLN		TOTAL
			PLN	HLN	
I	PPK DM I	40.161.847			40.161.847
II	PPK DM II	25.018.830	-	3.729.770	28.748.600
III	PPK DM III	225.478.542	-		225.478.542
IV	PPK DM IV	54.759.250	216.395.900	-	271.155.150
JUMLAH		345.418.469	216.395.900	3.729.770	565.544.139

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.000,-. Alokasi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari alokasi tahun 2013.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas berada di bawah pembinaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan.
- 2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
- 3) Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi.
- 4) Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem Dan Prosedur Informasi Pengawasan.

- 5) Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga.
- 6) Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Dan Audit Internal Eksternal dan Pengawasan Internal.

E. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2014

Sampai dengan akhir semester I tahun 2014, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya

1. Revisi tanggal 8 Februari 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi antar akun dalam 1 (satu) kegiatan.
2. Revisi tanggal 29 April 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi beberapa anggaran pada unit kerja, antara lain :
 - a. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menjadi Rp. 4.843.417.000,-,
 - b. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp. 3.350.000.000,-
 - c. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Lingkungan Hidup menjadi Rp. 7.884.965.000,-
 - d. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Permukiman dan Perumahan menjadi Rp. 12.560.990.000,-
3. Revisi tanggal 19 Juni 2014. Revisi yang dilakukan karena ada penghematan anggaran berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemoangan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2014.

BAB III

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 secara keseluruhan sebesar Rp.1.189.975.111.000,- yang terdiri dana RM sebesar Rp. 612.708.469.000,-, dana PLN sebesar Rp. 290.682.900.000,- dan HLN sebesar Rp.286.583.742.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Juni 2014 dari sebesarRp.248.434.253.816,- (21,47%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 136.951.108.339,- (23,62%), dana PHLN sebesar Rp. 111.483.145.477,- (19,31%). Sedangkan alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.299.970.000,- dalam laporan ini belum dapat disampaikan hasil realisasi pelaksanaannya. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II (akhir Juni) tahun 2014 yang dilaksanakan dari masing-masing program secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

TABEL 8
REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%		
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH	%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	345.418.469.000	216.395.900.000	3.729.770.000	220.125.670.000	565.544.139.000	83.824.223.641	24,27	58.907.762.908	27,22	698.245.000		59.606.007.908	27,08	143.430.231.549	25,36
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	35.000.000.000				35.000.000.000	1.612.413.106	4,61							1.612.413.106	4,61
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR	4.800.000.000				4.800.000.000	1.621.502.145	33,78							1.621.502.145	33,78
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	194.490.030.000	74.287.000.000	282.853.972.000	357.140.972.000	551.631.002.000	49.892.969.447	25,65	1.575.923.180		50.301.214.389		51.877.137.569		101.770.107.016	18,45
JUMLAH	579.708.499.000	290.682.900.000	286.583.742.000	577.266.642.000	1.156.975.141.000	136.951.108.339	23,62	60.483.686.088	20,81	50.999.459.389	17,54	111.483.145.477	19,31	248.434.253.816	21,47

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

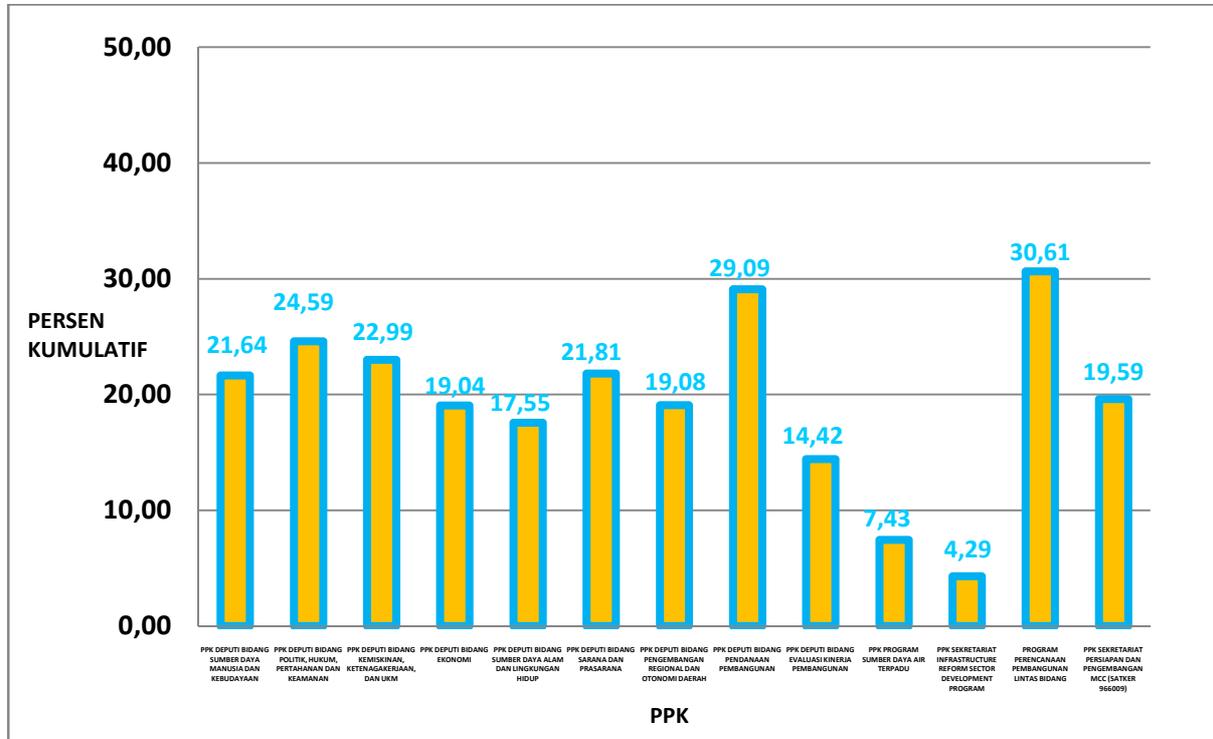
Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 sebesar Rp. 551.631.002.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 194.490.030.000,-, dana PHLN sebesar Rp. 357.140.972.000. Sampai dengan bulan Juni 2014, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp 101.770.107.016,- (18,45%).

Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincianrealisasi penyerapan anggaran dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 9 dan Gambar 3, serta penjelasannya sebagai berikut:

TABEL 9
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(NON DANA DEKOSENTRASI)
TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN					TOTAL	%	
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%	JUMLAH			%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	194.490.030.000	74.287.000.000	282.853.972.000	357.140.972.000	551.631.002.000	49.892.969.447	25,65	1.575.923.180		50.301.214.389		51.877.137.569		101.770.107.016	18,45
1 PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	17.270.000.000	-	7.843.417.000	7.843.417.000	25.113.417.000	4.708.947.200	27,27	-		725.947.950	9,26	725.947.950	9,26	5.434.895.150	21,64
2 PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	13.693.342.000	-	-	-	13.693.342.000	3.367.843.216	24,59	-		-	-	-	-	3.367.843.216	24,59
3 PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	19.200.950.000	-	3.350.000.000	3.350.000.000	22.550.950.000	4.338.569.808	22,60	-		846.914.400	-	846.914.400	-	5.185.484.208	22,99
4 PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	13.490.000.000	-	-	-	13.490.000.000	2.567.823.088	19,04	-		-	-	-	-	2.567.823.088	19,04
5 PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.730.000.000	-	7.884.965.000	7.884.965.000	25.614.965.000	4.494.467.868	25,35	-		-	-	-	-	4.494.467.868	17,55
6 PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	14.932.440.000	-	12.560.990.000	12.560.990.000	27.493.430.000	3.833.685.787	25,67	-		2.163.469.169	17,22	2.163.469.169	17,22	5.997.154.956	21,81
7 PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	24.529.279.000	10.244.900.000	-	10.244.900.000	34.774.179.000	5.763.268.445	23,50	872.585.406	8,52	-	-	872.585.406	8,52	6.635.853.851	19,08
8 PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.060.000.000	-	1.214.600.000	1.214.600.000	16.274.600.000	4.733.654.158	31,43	-		-	-	-	-	4.733.654.158	29,09
9 PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	14.340.000.000	-	-	-	14.340.000.000	2.067.530.976	14,42	-		-	-	-	-	2.067.530.976	14,42
10 PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	5.326.990.000	17.488.100.000	-	17.488.100.000	22.815.090.000	992.771.216	18,64	703.337.774	4,02	-	-	703.337.774	4,02	1.696.108.990	7,43
11 PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	8.340.570.000	46.534.000.000	-	46.534.000.000	54.894.570.000	2.354.733.616	28,23	-	-	-	-	-	-	2.354.733.616	4,29
12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG	20.576.459.000	-	-	-	20.576.459.000	6.299.130.524	30,61	-		-	-	-	-	6.299.130.524	30,61
13 PPK PENGELOLAAN HIBAH MCC SATKER (966009)	10.000.000.000	-	250.000.000.000	250.000.000.000	260.000.000.000	4.370.543.545	43,71	-		46.564.882.870	18,63	46.564.882.870	18,63	50.935.426.415	19,59

GAMBAR 3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014



Realisasi penyerapan sampai dengan semester II tahun 2014 untuk PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I (PPK DM I) telah menyerap dana sebesar 30,61%, disusul oleh PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dengan penyerapan dana sebesar 29,09%, sedangkan penyerapan terkecil terdapat pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* (IRSDP) sebesar 4,29%.

1) PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

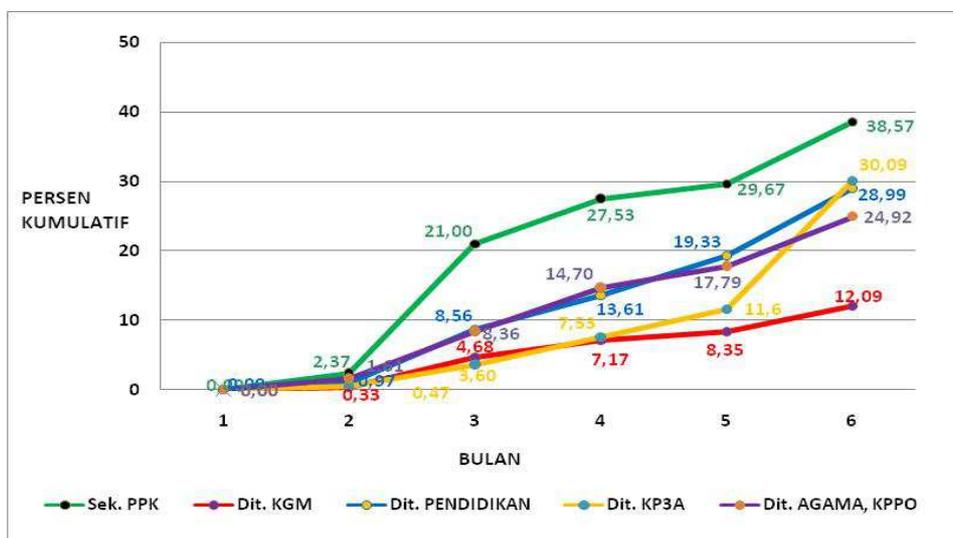
Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 25.113.417.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 17.270.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 7.843.417.000,-. Sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2014, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.434.895.150,- (21,64%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 10.

TABEL 10
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%		
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH	%
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	17.270.000.000	-	7.843.417.000	7.843.417.000	25.113.417.000	4.708.947.200	27,27	-	-	725.947.950	9,26	725.947.950	9,26	5.434.895.150	21,64
a Sekretariat PPK Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan	360.000.000	-	-	-	360.000.000	138.843.300	38,57	-	-	-	-	-	-	138.843.300	38,57
b Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	4.900.000.000	-	4.843.417.000	4.843.417.000	9.743.417.000	1.154.640.700	23,56	-	-	23.500.000	0,49	23.500.000	0,49	1.178.140.700	12,09
c Direktorat Agama dan Pendidikan	2.590.000.000	-	-	-	2.590.000.000	750.901.800	28,99	-	-	-	-	-	-	750.901.800	28,99
d Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.770.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	5.270.000.000	883.057.900	23,42	-	-	702.447.950	46,83	702.447.950	46,83	1.585.505.850	30,09
e Direktorat Agama Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	5.650.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	7.150.000.000	1.781.503.500	31,53	-	-	-	-	-	-	1.781.503.500	24,92

Dana HLN pada Kedepuitan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan: 1) Kerjasama Pemerintah RI-UNDP dalam MDGs Roadmap: *Support to Acceleration of MDGs Achievement in Indonesia 2013-2015*, sebesar Rp. 1.500.000.000,- pada Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 2) *UNPFA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNPFA* sebesar Rp. 1.500.000.000,- pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 3) Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-Unicef 2011-2015 dan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance for Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR) sebesar Rp. 4.843.417.000,- pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

GAMBAR 4
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2014



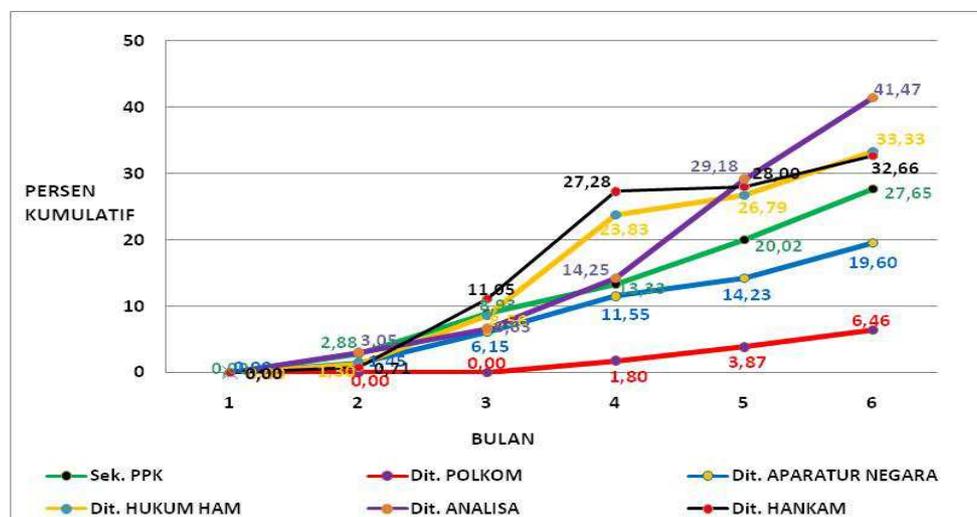
2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 13.693.342.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 3.367.843.216,- (24,59%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE Iidi Kedeputusan Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasionalbidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

TABEL 11
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN										
	RM	PHLN				RM	%	PHLN					TOTAL	%		
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%	JUMLAH			%	
PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	13.693.342.000	-	-	-	13.693.342.000	3.367.843.216	24,59	-	-	-	-	-	-	-	3.367.843.216	24,59
a Sekretariat PPK Deputy Bidang Polhankam	775.360.000	-	-	-	775.360.000	214.398.000	27,65	-	-	-	-	-	-	214.398.000	27,65	
b Direktorat Politik dan Komunikasi	2.999.000.000	-	-	-	2.999.000.000	193.841.176	6,46	-	-	-	-	-	-	193.841.176	6,46	
c Direktorat Aparatur Negara	3.910.000.000	-	-	-	3.910.000.000	766.358.060	19,60	-	-	-	-	-	-	766.358.060	19,60	
d Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.051.968.000	-	-	-	2.051.968.000	683.977.840	33,33	-	-	-	-	-	-	683.977.840	33,33	
e Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	2.462.240.000	-	-	-	2.462.240.000	1.021.045.440	41,47	-	-	-	-	-	-	1.021.045.440	41,47	
f Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1.494.774.000	-	-	-	1.494.774.000	488.222.700	32,66	-	-	-	-	-	-	488.222.700	32,66	

GAMBAR 5
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN TAHUN 2014



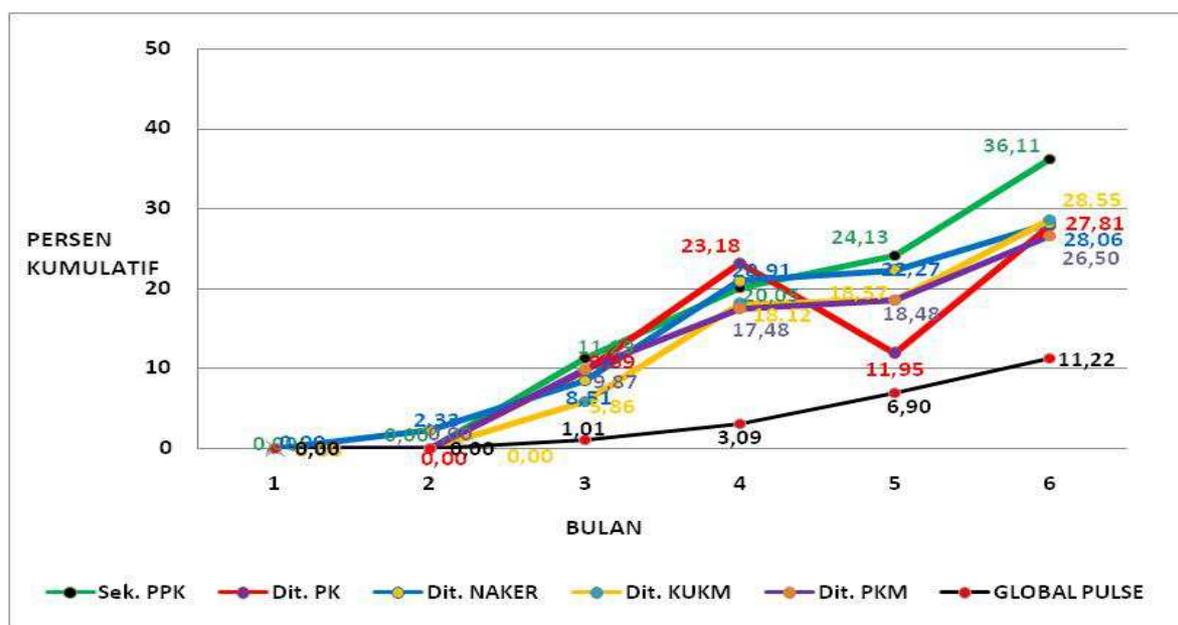
3) PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 22.550.950.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 5.185.484.208,- (22,99%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 12 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

TABEL 12
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKMTIRWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN					TOTAL	%	
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%	JUMLAH			
PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	19.200.950.000	-	3.350.000.000	3.350.000.000	22.550.950.000	4.338.569.808	22,60	-	-	846.914.400	-	846.914.400	-	5.185.484.208	22,99
a Sekretariat PPK Dep. Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan & UKM	900.000.000	-	-	-	900.000.000	325.027.457	36,11	-	-	-	-	-	-	325.027.457	36,11
b Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	3.250.000.000	-	3.350.000.000	3.350.000.000	6.600.000.000	988.419.520	30,41	-	-	846.914.400	-	846.914.400	-	1.835.333.920	27,81
c Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	2.860.950.000	-	-	-	2.860.950.000	802.703.461	28,06	-	-	-	-	-	-	802.703.461	28,06
d Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.990.000.000	-	-	-	2.990.000.000	853.750.000	28,55	-	-	-	-	-	-	853.750.000	28,55
e Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.200.000.000	-	-	-	2.200.000.000	583.059.065	26,50	-	-	-	-	-	-	583.059.065	26,50
f Global Pulse	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000	785.610.305	11,22	-	-	-	-	-	-	785.610.305	11,22

GAMBAR 6
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TRIWULAN II TAHUN 2014



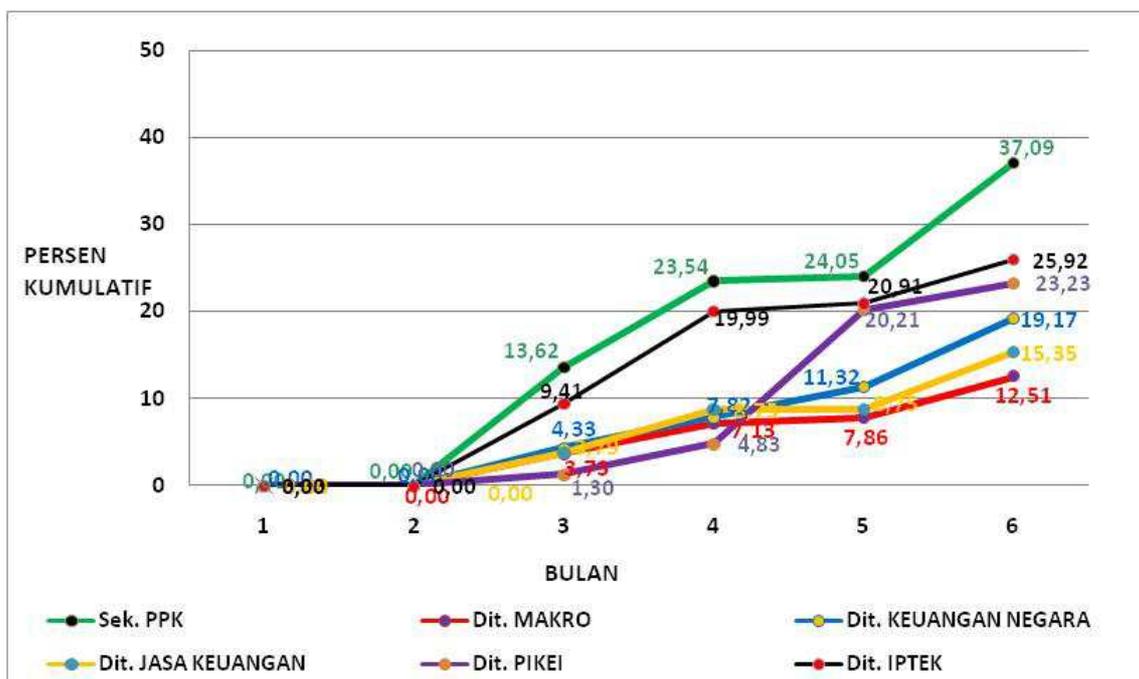
4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.13.490.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 2.567.823.088,- (19,04%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

TABEL 13
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%		
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH	%
PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	13.490.000.000	-	-	-	13.490.000.000	2.567.823.088	19,04							2.567.823.088	19,04
a Sekretariat PPK Deputi Bidang Ekonomi	238.000.000	-	-	-	238.000.000	88.267.600	37,09							88.267.600	37,09
b Direktorat Perencanaan Makro	3.875.000.000	-	-	-	3.875.000.000	484.869.780	12,51							484.869.780	12,51
c Direktorat Keuangan Negara	1.959.750.000	-	-	-	1.959.750.000	375.655.400	19,17							375.655.400	19,17
d Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter	2.200.000.000	-	-	-	2.200.000.000	337.755.523	15,35							337.755.523	15,35
e Dir. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	2.642.250.000	-	-	-	2.642.250.000	613.869.499	23,23							613.869.499	23,23
f Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN	2.575.000.000	-	-	-	2.575.000.000	667.405.286	25,92							667.405.286	25,92

GAMBAR 7
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EKONOMI TRIWULAN II TAHUN 2014



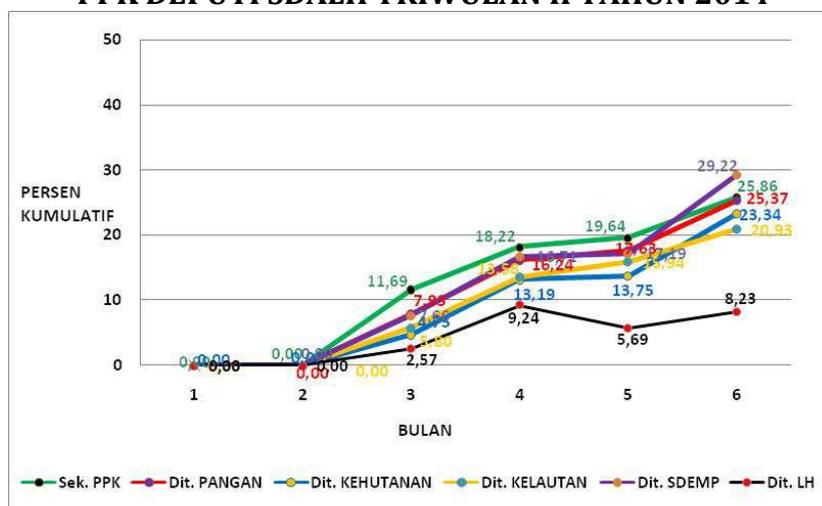
5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.25.614.965.000,-, yang terdiri daridana RM sebesar Rp. 17.730.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 7.884.965.000,-. Unit kerja yang mengelola dana HLN adalah Direktorat Lingkungan yang merupakan dana hibah GTZ dengan kegiatan *Advisory Services for Climate Protection: Mainstreaming Climate Change International Development Planning Indonesia*, dan hibah dari UNDP dengan kegiatan *Support for Preparation Arranement for Indonesia Climate Change Trust Fund (Per-ICCT)*. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Juni 2014 baru mencapai sebesar Rp. 4.494.467.868,- (17,55%) untukdana RM, sedangkan untuk dana HLN masih 0%.Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 7.

TABEL 14
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN								
	RM	PLN	HLN	JUMLAH	TOTAL	RM	%	PLN	%	HLN	%	JUMLAH	%
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.730.000.000	-	7.884.965.000	7.884.965.000	25.614.965.000	4.494.467.868	25,35	-	-	-	-	4.494.467.868	17,55
a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.970.000.000	-	-	-	1.970.000.000	509.467.091	25,86	-	-	-	-	509.467.091	25,86
b Direktorat Pangan dan Pertanian	3.620.000.000	-	-	-	3.620.000.000	918.225.604	25,37	-	-	-	-	918.225.604	25,37
c Direktorat Kehutanan & Konservasi Sumber Daya Air	2.340.000.000	-	-	-	2.340.000.000	546.209.664	23,34	-	-	-	-	546.209.664	23,34
d Direktorat Kelautan dan Perikanan	2.600.000.000	-	-	-	2.600.000.000	544.297.549	20,93	-	-	-	-	544.297.549	20,93
e Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	1.022.578.174	29,22	-	-	-	-	1.022.578.174	29,22
f Direktorat Lingkungan Hidup	3.700.000.000	-	7.884.965.000	7.884.965.000	11.584.965.000	953.689.786	25,78	-	-	-	-	953.689.786	8,23

GAMBAR 8
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN II TAHUN 2014



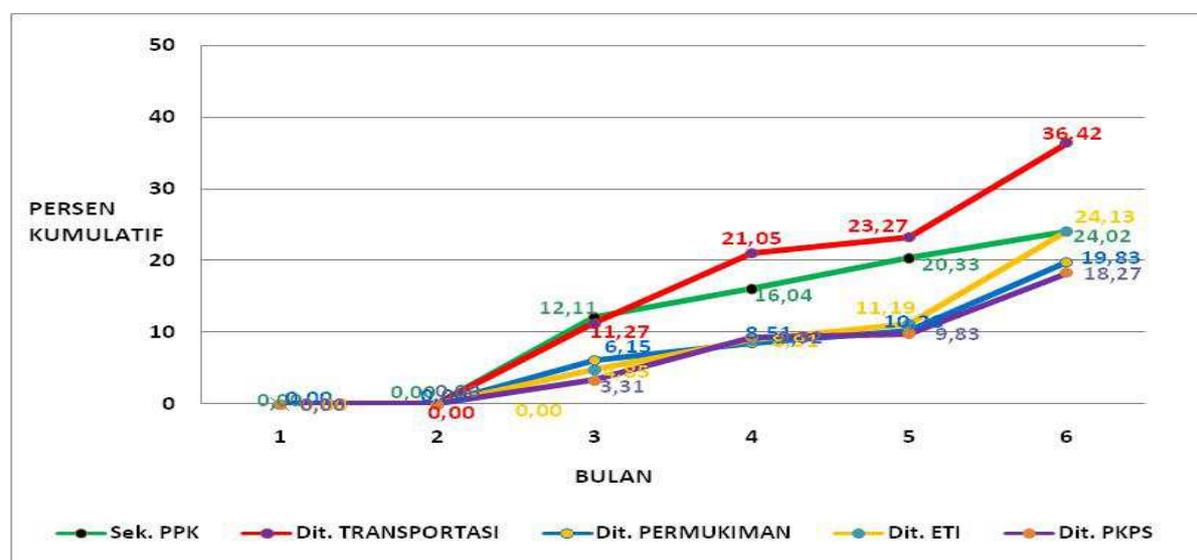
6) PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.27.493.430.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 14.932.440.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 12.560.990.000,-, Dana HLN dilaksanakan oleh Direktorat Pemukiman dan Perumahan. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 untuk dana RM sebesar Rp.5.997.154.956,- (21,81%), dan dana hibah sebesar Rp.2.163.469.169,- (17,22%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 15 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 8.

TABEL 15
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN				REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN										
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN					TOTAL	%	
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%	JUMLAH			%
PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	14.932.440.000	-	12.560.990.000	12.560.990.000	27.493.430.000	3.833.685.787	25,67	-	-	2.163.469.169	17,22	2.163.469.169	17,22	5.997.154.956	21,81
a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	764.214.000	-	-	-	764.214.000	183.588.150	24,02	-	-	-	-	-	-	183.588.150	24,02
b Direktorat Transportasi	3.185.786.000	-	-	-	3.185.786.000	1.160.116.410	36,42	-	-	-	-	-	-	1.160.116.410	36,42
c Direktorat Pemukiman dan Perumahan	3.232.440.000	-	12.560.990.000	12.560.990.000	15.793.430.000	968.202.950	29,95	-	-	2.163.469.169	17,22	2.163.469.169	17,22	3.131.672.119	19,83
d Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	1.800.000.000	-	-	-	1.800.000.000	434.427.410	24,13	-	-	-	-	-	-	434.427.410	24,13
e Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000	1.087.350.867	18,27	-	-	-	-	-	-	1.087.350.867	18,27

GAMBAR 9
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN II TAHUN 2014



7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 34.774.179.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 24.529.279.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 10.244.900.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Juni 2014 ini baru mencapai sebesar Rp. 6.635.853.851,- (19,08%) sebagaimana terdapat pada Tabel 16.

TABEL 16
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%		
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH	%
PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	24.529.279.000	10.244.900.000	-	10.244.900.000	34.774.179.000	5.763.268.445	23,50	872.585.406	8,52	-	-	872.585.406	8,52	6.635.853.851	19,08
a Sekretariat PPK Deputi Bid. Pengembangan Regional & Otda	800.000.000	-	-	-	800.000.000	205.486.950	25,69	-	-	-	-	-	-	205.486.950	25,69
b Direktorat Pengembangan Wilayah	7.294.322.000	10.244.900.000	-	10.244.900.000	17.539.222.000	1.141.241.500	15,65	872.585.406	8,52	-	-	872.585.406	8,52	2.013.826.906	11,48
c Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4.090.000.000	-	-	-	4.090.000.000	1.185.386.097	28,98	-	-	-	-	-	-	1.185.386.097	28,98
d Direktorat Otonomi Daerah	4.803.548.000	-	-	-	4.803.548.000	1.139.791.383	23,73	-	-	-	-	-	-	1.139.791.383	23,73
e Direktorat Perkotaan dan Perdesaan	3.351.000.000	-	-	-	3.351.000.000	708.732.375	21,15	-	-	-	-	-	-	708.732.375	21,15
f Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan	4.190.409.000	-	-	-	4.190.409.000	1.382.630.140	33,00	-	-	-	-	-	-	1.382.630.140	33,00

Alokasi pinjaman luar negeri terdapat pada Direktorat Pengembangan Wilayah dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam kegiatan *Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE) I* atau Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep *Community Driven Development (CDD)* dan *Labor Intensive Activities (LIA)*, sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri.

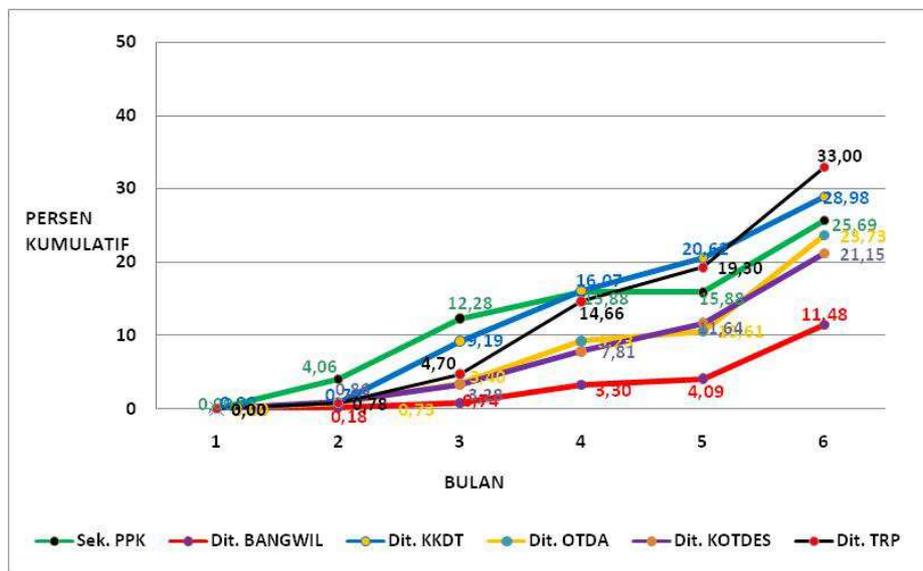
Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi penanggung jawab pinjaman JICA dengan Direktorat Pengembangan Wilayah sebagai tim pelaksana mengkoordinasikan instansi lainnya yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagai instansi penanggung jawab, alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW ini berada di Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek pinjaman RISE I ini akan berakhir pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 ini telah efektif pinjaman RISE II. Dana yang telah dialokasikan pada tahun 2014 ini untuk kedua proyek masing-masing sebesar Rp. 4.036.300.000,- untuk RISE I

dan Rp. 6.208.600.000,- untuk RISE II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PISEW pada tahun 2014 adalah registrasi kegiatan dalam DIPA 2014 merupakan alokasi gabungan dari RISE I dan RISE II dan teregister dalam nama RISE I, sehingga perlu dilakukan revisi supaya pelaksanaan kegiatan tidak terganggu.

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 9.

GAMBAR 10
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2014



8) PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.16.274.600.000,- terdiri dari RM sebesar Rp. 15.060.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 1.214.600.000,- yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional untuk kegiatan *Strengthening Innovative Partnership For Development Cooperation (SIP-DC)*. Realisasi penyerapan anggaran sampai

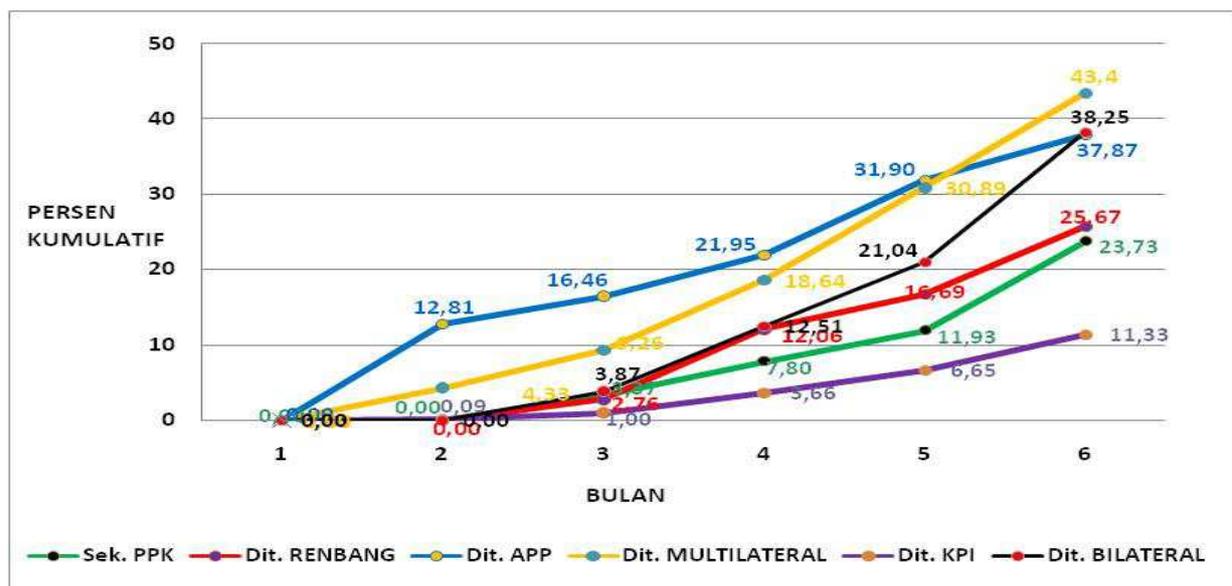
dengan Juni 2014 mencapai sebesar Rp. 4.733.654.158,- (29,09%) sebagaimana terdapat pada Tabel 17.

TABEL 17
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN					TOTAL	%	
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%	JUMLAH			%
PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.060.000.000	-	1.214.600.000	1.214.600.000	16.274.600.000	4.733.654.158	31,43	-	-	-	-	-	-	4.733.654.158	29,09
a Sekr. PPK Deputy Bid. Pendanaan Pembangunan	898.637.000	-	-	-	898.637.000	213.237.300	23,73	-	-	-	-	-	-	213.237.300	23,73
b Dir. Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1.939.464.000	-	-	-	1.939.464.000	497.875.900	25,67	-	-	-	-	-	-	497.875.900	25,67
c Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	4.436.048.000	-	-	-	4.436.048.000	1.679.721.608	37,87	-	-	-	-	-	-	1.679.721.608	37,87
d Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.493.700.000	-	-	-	2.493.700.000	1.082.171.800	43,40	-	-	-	-	-	-	1.082.171.800	43,40
e Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	3.347.500.000	-	1.214.600.000	1.214.600.000	4.562.100.000	516.824.150	15,44	-	-	-	-	-	-	516.824.150	11,33
f Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.944.651.000	-	-	-	1.944.651.000	743.823.400	38,25	-	-	-	-	-	-	743.823.400	38,25

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 10.

GAMBAR 11
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2014



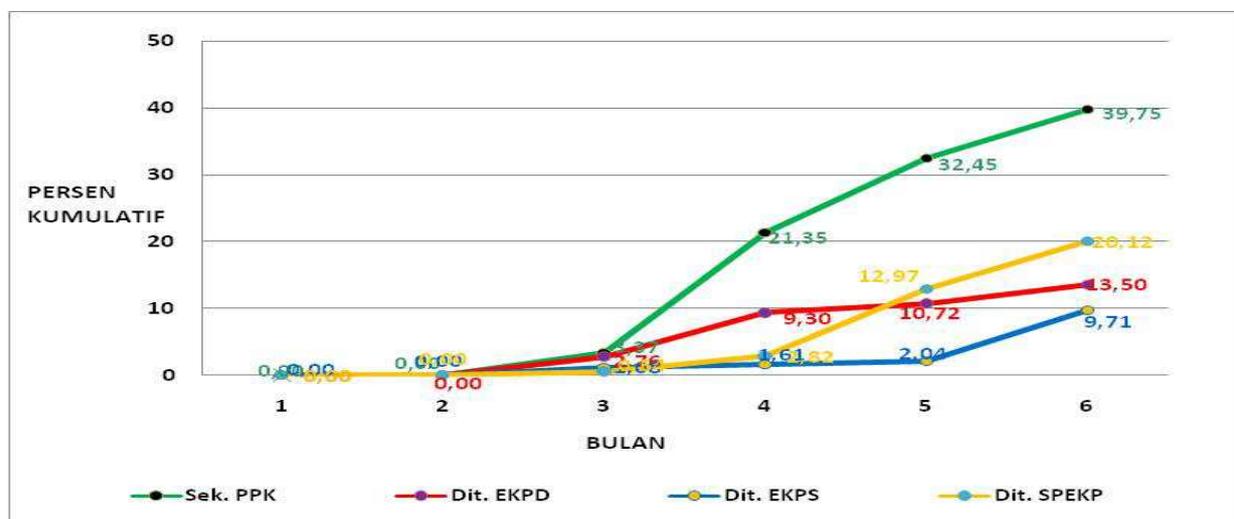
9) PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 14.340.000.000,-, dengan realisasi penyerapan baru mencapai sebesar Rp. 2.067.530.976,-(14,42%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 18 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 11.

TABEL 18
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II
TAHUN 2014

PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN								
	RM	PHLN			TOTAL	RM	%	PHLN				TOTAL	%	
		PLN	HLN	JUMLAH				PLN	%	HLN	%			JUMLAH
PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	14.340.000.000	.	.	.	14.340.000.000	2.067.530.976	14,42						2.067.530.976	14,42
a Sekretariat PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	250.000.000	.	.	.	250.000.000	99.377.750	39,75						99.377.750	39,75
b Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9.053.892.000	.	.	.	9.053.892.000	1.222.082.726	13,50						1.222.082.726	13,50
c Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	2.568.054.000	.	.	.	2.568.054.000	249.382.150	9,71						249.382.150	9,71
d Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.468.054.000	.	.	.	2.468.054.000	496.688.350	20,12						496.688.350	20,12

GAMBAR 12
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2014



10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 22.815.090.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 5.326.990.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 17.488.100.000,-, dengan realisasi penyerapan RM sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 992.771.216,- (18,64%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 4,02% atau sebesar Rp. 703.337.774,- Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan tentang pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu mengelola beberapa kegiatan yang berasal dari pinjaman luar negeri, yaitu: (1) *Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II-WB* sebesar Rp. 2.253.729.000,-; (2) *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP)-ADB* sebesar Rp. 2.100.000.000,-; (3) *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia (DISMP II)-JICA* sebesar Rp. 2.000.000.000,-; (4) *Urban Flood Control System in Selected Cities-JICA* sebesar Rp. 2.472.270.000,-; (5) *Dam Operation Improvement and Improvement and Safety Project (DOISP)-WB* sebesar Rp. 1.048.984.000,-; dan (6) *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* sebesar Rp. 7.613.117.000,-.

11) PPK Sekretariat Infrastructure Reform Sector Development Program

Alokasi anggaran tahun 2014 pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 54.894.570.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 8.340.570.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 46.554.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)/ Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)*. Realisasi penyerapan anggaran RM sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 2.354.733.616,- (28,23%), sementara realisasi penyerapan dana PLN masih 0%.

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

12) PPK Pengelola Hibah MCC

Pada tanggal 19 November 2011 Pemerintah Amerika Serikat diwakili Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton dan Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Keuangan, Agus Martowadjojo menandatangani *MCC-Compact Agreement* (Perjanjian Hibah *Program Compact*) selama 5 tahun dengan nilai USD 600 juta.

Tujuan dari *Program Compact* adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga program yaitu: (1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*), (2) Kesehatan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek (*Community-based Health and Nutrition*), (3) Modernisasi Sistem Pengadaan (*Procurement Modernization*). *Program Compact* di Indonesia dimulai sejak ditandatanganinya *Implementation Letter* oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan *VP-Department of Compact Operations* – MCC pada tanggal 2 April 2013 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2018.

Sesuai dengan PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari Hibah MCC, dalam DIPA Satker juga dialokasikan dana yang bersumber dari rupiah murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah *Program Compact*.

Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelola Hibah MCC pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 260.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 250.000.000.000,-, dengan realisasi penyerapan dana RM sampai dengan akhir Juni 2014 mencapai sebesar Rp 4.370.543.545,- (43,71%), sementara realisasi penyerapan dana HLN mencapai 18,63%, atau sebesar Rp 46.564.882.870,- yang di bawah koordinasi Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika.

13) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I

Program Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada dalam tanggung jawab PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I adalah kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp 20.576.459.000,- untuk kegiatan Kajian dan Prakarsa Strategis Lintas Bidang sebesar Rp 13.076.459.000,-, Pemanfaatan Penyusunan RPJMN dengan alokasi dana Rp 7.000.000.000,-, dan Forum Konsultasi Publik sebesar Rp. 500.000.000. Realisasi penyerapan dana sampai dengan akhir Juni 2014 sebesar Rp 6.299.130.524,- (30,61%).

Pada pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Perencanaan Pembangunan berjalan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi dikarenakan antara lain dalam kurun waktu semester I sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, dan masih terdapat penerapan aplikasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) dari Kementerian Keuangan yang belum bisa optimal, sehingga mengakibatkan pencairan anggaran sedikit terganggu dan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, hal ini juga disebabkan adanya revisi DIPA yang memerlukan waktu yang relatif lama mulai dari proses penyampaian dari unit kerja yang akan melakukan perbaikan atas anggaran dan kegiatannya, sampai dengan proses penyelesaian revisinya.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 565.544.139.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 345.418.469.000,- dan dana PHLN sebesar Rp 220.125.670.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 mencapai Rp. 143.430.231.549,- (25,36%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 83.824.223.641,- (24,27%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 59.606.007.908,- (27,08%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 19.

TABEL 19
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN										
		RM	PLN	PHLN HLN	JUMLAH	TOTAL	RM	%	PLN	%	PHLN HLN	%	JUMLAH	%	TOTAL	%
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	345.418.469.000	216.395.900.000	3.729.770.000	220.125.670.000	565.544.139.000	83.824.223.641	24,27	58.907.762.908	27,22	698.245.000		59.606.007.908	27,08	143.430.231.549	25,36
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS I	40.161.847.000	-	-	-	40.161.847.000	10.186.021.655	25,36	-	-	-	-	-	-	10.186.021.655	25,36
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II	25.018.830.000	-	3.729.770.000	3.729.770.000	28.748.600.000	4.521.978.634	18,07	-	-	698.245.000	18,72	698.245.000	18,72	5.220.223.634	18,16
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS III	225.478.542.000	-	-	-	225.478.542.000	60.952.867.992	27,03	-	-	-	-	-	-	60.952.867.992	27,03
4	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV	54.799.250.000	216.395.900.000	-	216.395.900.000	271.155.150.000	8.163.355.360	14,91	58.907.762.908	27,22	-	-	58.907.762.908	27,22	67.071.118.268	24,74

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan dana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya telah mampu mencapai sebesar 25,36% dari total alokasi tahun 2014. Pusdatinrenbang yang mengelola alokasi dana terbesar di Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk didalamnya mengelola 3 pinjaman luar negeri, yaitu SPIRIT, PHRDP III dan PHRDP IV telah mampu menyerap dana 24,74%. Sementara Kegiatan IDF-*Strategic Management and Institutional Strengthening Project* yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia sampai dengan akhir Juni 2014 ini belum melakukan penarikan dana. Hibah yang berasal dari Bank Dunia ini mempunyai pagu sebesar Rp 1.000.000.000,- kemudian mengalami perubahan pada revisi ke-2 menjadi Rp. 3.729.770.000,-, karena proyek ini tidak akan diperpanjang dan akan selesai pada tanggal 12 September 2014.

Seperti halnya dengan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya juga terkendala dengan aplikasi SPAN. Aplikasi SPAN yang belum sempurna, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran beasiswa kepada karyasiswa yang sedang menuntut ilmu di negara lain. Keterlambatan pembayaran ini berdampak bagi karyasiswa mengingat biaya hidup di negara asing sangat tinggi.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 35.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 1.612.413.106,- (4,61%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi

perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

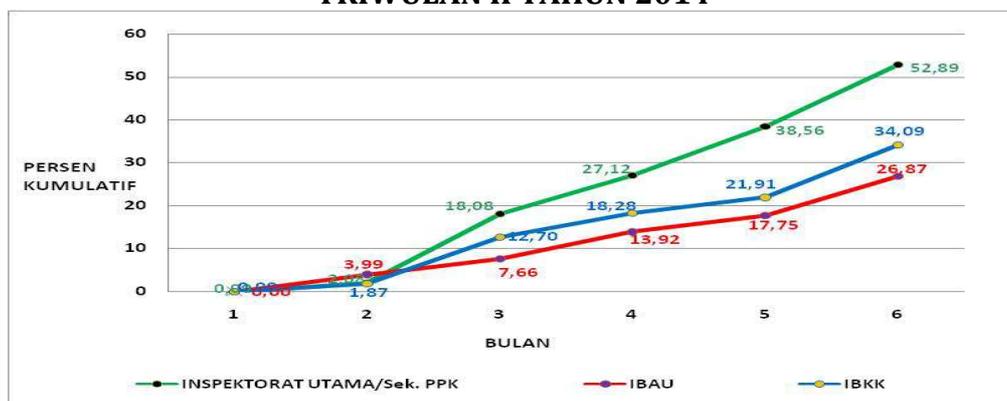
D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 4.800.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp. 1.621.502.145,- (33,78%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 12.

TABEL 20
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN II TAHUN 2014

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR		4.800.000.000	-	4.800.000.000	1.621.502.145	33,78	-		1.621.502.145	33,78
a	Inspektorat Utama/Sekretariat PPK	775.000.000		775.000.000	409.918.632	52,89			409.918.632	52,89
b	Inspektorat Bidang Administrasi Umum	2.225.000.000		2.225.000.000	597.896.222	26,87			597.896.222	26,87
c	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	1.800.000.000		1.800.000.000	613.687.291	34,09			613.687.291	34,09

GAMBAR 13
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS
TRIWULAN II TAHUN 2014



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Juni 2014 (Triwulan II), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker MCC adalah sebesar Rp. 1.156.975.141.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 579.708.499.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 577.266.642.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2014 baru mencapai sebesar Rp. 248.434.253.816,- (21,47%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 136.951.108.339,- (23,62%), dan dana PHLN sebesar Rp. 111.483.145.477,- (19,31%). Penyerapan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penyerapan dana pada periode yang sama tahun lalu yang mampu menyerap dana sebesar 24,70%.
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Juni 2014 masih sangat kecil, disebabkan antara lain:
 - a. Kebijakan terkait adanya penghematan dan pemotongan anggaran, menyebabkan pengelola kegiatan perlu melakukan revisi DIPA, sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Proses revisi/perubahan DIPA yang dilakukan beberapa kali, yang proses pengusulan dan pembahasan revisi cukup memakan waktu lama.
 - c. Terjadinya pelaksanaan teknis dalam proses pencairan dana, seperti: penulisan nilai kontrak pada ringkasan kontrak tidak sesuai dengan kontrak, tidak melampirkan rekening penerima, penulisan nama pemilik rekening sering keliru, kesalahan penulisan jenis SPM pada SPM dll yang menyebabkan penundaan proses, karena dokumen harus dikembalikan lagi kepada unit kerja pengusul dan pada akhirnya menyebabkan tertundanya pencairan dana.
 - d. Sistem aplikasi SPAN Kementerian Keuangan yang belum berjalan dengan sempurna masih membuat kendala dalam proses pencairan dana karena mengakibatkan waktu yang lebih lama dalam memprosesan.

3. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan dana PHLN antara lain:
 - a. Kurangnya kesadaran pengelola hibah untuk melakukan pencatatan dan pengesahan hibah serta baru melaksanakan pencatatan hibah langsung setelah kegiatan dilaksanakan pada tahun berjalan
 - b. Koordinasi antara PPK dan unit kerja pengelola hibah masih kurang efektif, sehingga terjadi miskomunikasi dalam pencatatan dalam laporan keuangan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
 - a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah disusun.
 - b. Agar dapat mempersiapkan lebih dini dalam menyusun legalisasi administrasi kegiatan antara lain berupa surat-surat keputusan dan data pendukung lainnya.
 - c. Mempelajari tatacara/pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, proses pencairan anggaran, pelaporan kegiatan/program yang akan dilaksanakan.
 - d. Pencatatan kegiatan ke dalam DIPA perlu lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan register seperti MAK, kode kegiatan yang mengakibatkan perlu dilaksanakan revisi DIPA.
2. Untuk kelancaran proses pencairan, khususnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerbit SPM serta para petugas pendukungnya agar dapat berkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada unit kerja yang mengusulkan (melalui PPK) jika terdapat hal-hal yang perlu segera diperbaiki/disempurnakan/diselesaikan dalam proses pengajuan usulan pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pencairan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan menjadi lebih cepat, dan sesuai dengan rencana.

3. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
4. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam aplikasi SPAN sehingga pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.
5. Untuk pengelola pinjaman dan hibah luar negeri perlu untuk melaksanakan tertib administrasi.

Dalam Komitmen Jakarta yang telah disepakati pada awal tahun 2009 antara Pemerintah Indonesia dengan para mitra pembangunan luar negeri ditetapkan suatu outcome bahwa seluruh hibah luar negeri pada tahun 2014 sudah harus direncanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah dan dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Pencatatan hibah pada umumnya dipersiapkan dengan proses eksekusi yang lebih sempurna dibandingkan dengan kegiatan yang dibiayai dari perencanaan APBN. Oleh karena itu, maka pencatatan ini haruslah mencapai tingkat akuntabilitas yang baik dan memadai. Ini juga menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk *quality spending* (kualitas belanja publik), walaupun nilai hibah luar negeri relatif kecil dibandingkan dengan dana rupiah yang dikelola pemerintah. Selain itu pencatatan hibah yang tertib juga turut andil dalam menciptakan kondisi pemerintah yang akuntabel.